

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Cet. 2. Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Hamzah. Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo. Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyadi, Lilik, Yahya, Bettina, dan Suhariyanto, Budi. 2019. *Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nuraeny, Henny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Oemar Sjarif Hiariej, Eddy. 2020. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2011. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Tim Imparsial. 2006. *Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati Di Indonesia*. Jakarta: Imparsial.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia*. Jakarta: Imparsial.
- Warassih, Esmi, 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, dkk. 2016. *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*. Yogyakarta: Thafa Media.

## B. Buku Elektronik

- El Muhtaj, Majda. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media Group. tersedia di website <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/64978/>.
- Ramiyanto. 2018. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. tersedia di website <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/123241>.
- Swantoro, Herri. 2017, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenadamedia Group. tersedia di website <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/129050/>.
- Tim Imparsial. 2020. *Evaluasi Praktik Hukuman Mati Era Pemerintahan Jokowi (2014-2019)*. Jakarta: Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor. tersedia di website [https://imparsial.org/wp-content/uploads/2020/09/Evaluasi-Praktik-Hukuman-Mati-Pada-Era-Pemerintahan-Jokowi-2014-2019\\_IMPARSIAL.pdf](https://imparsial.org/wp-content/uploads/2020/09/Evaluasi-Praktik-Hukuman-Mati-Pada-Era-Pemerintahan-Jokowi-2014-2019_IMPARSIAL.pdf).
- \_\_\_\_\_ dan Penyusun Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI). E-Book. 2016. *UNFAIR TRIAL Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Imparsial The Human Rights Monitor.
- Yon Artiono Arba'i. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Tersedia di website <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/171203/>.

## C. Jurnal Ilmiah

- Adi Harsanto, Jubair, dan Sulbadana. “Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Katalogis*. Vol. 5. No. 3. Maret 2017. Sulawesi Tengah: Program Pascasarjana Univeristas Tadulako.
- Ahmad Bahiej. “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia”. *Jurnal Sosio Religia*. Vol. 5. No. 2. Februari 2006. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ahmad Faiz Muhlizi. “Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum Kajian Putusan Mahkamah

- Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 8. No. 2. Agustus 2015. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Ahmad Fauzi. “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 3. No. 1. Maret 2014. Jakarta: Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Aista Wisnu Putra dan Rahmi Dwi Sutanti. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 2. No. 3. Agustus 2020. Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Alviano Maarial. “Independensi Hakim dalam Memutus Perkara Praperadilan Menurut KUHAP”. *Lex Crimen*. Vol. 4. No. 5. Juli 2015. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Asmarani Lamsu. “Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Verkapte Vijspraak*) dalam Perkara Pidana”. *Lex Crimen*. Vol. 3. No. 4. Agustus-November 2014. Manado: Fakultas Hukum Universitas Negeri Sam Ratulangi.
- Auliah Andika Rukman. “Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM”. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 4. No. 1. Mei 2016. Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Bilryan Lumempouw. “Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana”. *Lex Crimen*. Vol. 2. No. 3. Juli 2013. Manado: Fakultas Hukum Universitas Negeri Sam Ratulangi.
- Chaerul Risal. “Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana”. *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 4. No. 2. Desember 2017. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar.
- Daria. “Eksistensi Upaya Hukum Banding Pada Peradilan Pajak Di Indonesia”. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol. 8. No. 1. April 2020. Batam: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
- Debora Angelia Pardosi. “Peran Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrat Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah”. *Soumatera Law Review*. Vol. 1. No. 2. Oktober 2018. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- Denna Yunita Karunia Putri. "Tinjauan Pengajuan Grasi Oleh Terpidana Mati Pasca Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45PK/Pid.Sus/2016)". *Verstek: Jurnal Hukum Acara*. Vol. 6. No. 3. 2018. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Dhani Kristanto Utomo, Siti Muslimah, dan Handoyo Leksono. "Kajian Tentang Penundaan Eksekusi Mati Berdasarkan Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional". *Belli Ac Pacis Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 2. No. 2. Desember 2016. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Diana Yusyanti. "Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum. Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum". *Widya Yustisia*. Vol. 1. No. 2. Februari 2015. *Public Knowledge Project: Open Jurnal Systems*.
- Dudu Duswara Machmudin. "Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12. No. 2. Juni 2015. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata". *Mimbar Hukum*. Vol. 21. No. 2. Juni 2009. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Ellya Rosana. "Hukum dan Perkembangan Masyarakat". *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. Vol. 9. No. 1. Januari-Juni 2013. Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Faisal. "Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Vol. 1. No. 1. November 2017. Langsa: Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Fence M. Wantu. "Mewujudkan Kepastian Hukum. Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12. No. 3. September 2012. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Harab Zafrulloh. "Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana". *Jurnal Thenkyang*. Vol. 2. No. 1.

Desember 2019. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang.

Hasan Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *SIGN Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 2. Maret 2021. Surabaya: Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Hesti Armiwulan. "Hak Asasi Manusia dan Hukum". *Jurnal Yustika*. Vol. 7. No. 2. Desember 2004. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

I Made Widi Adi Peremana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. "Tinjauan Yuridis Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Pada Perkara Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 1. No. 2. September 2020. Bali: Warmadewa Press.

Inge Dwisvimiar. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11. No. 3. September 2011. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Iyan Nasriyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia". *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Vol. 10. No. 2. Desember 2019. Kuningan: Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Janpatar Simamora. "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012". *Jurnal Yudisial*. Vol. 7. No. 1. April 2014. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Lutfil Ansori. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Yuridis*. Vol. 4. No. 2. Desember 2017. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Meirina Fajarwati. "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14. No. 2. Juni 2017. Jakarta: Sub Direktorat Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia.

M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, dan Erwin. "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap

- Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum”. *Pampas: Journal of Criminal Law*. Vol. 1. No. 2. Oktober 2020. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Monica Sara Kornardi. “Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum di Indonesia”. *UAJY Library*, 2017. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muhammad Sabil Ryandika dan Jatmiko Wirawan. “Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai *Judex Juris* dalam Perkara Pidana Studi Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012”. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 2. No. 2. Juli 2015. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Musa Darwin Pane. “Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Vol. 16. No. 1. Oktober 2018. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
- Prianter Jaya Hairi. “Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi”. *Jurnal Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. Vol. 2. No. 1. Juni 2011. Jakarta: Pusat Penelitian Bidang Hukum dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Priscilia Singal. “Fungsi Lembaga Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Lex et Societatis*. Vol. 1. No. 2. April-Juni 2013. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Putra Halomoan Hsb. “Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum”. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 1. No. 1. Juni 2015. Padang: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- R. Tony Prayogo. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13. No. 2. Agustus 2016. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Rahmat Dahlan. “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6. No. 1. April 2016. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Rendi Renaldi Mumbunan. "Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana". *Lex Crimen*. Vol. 7. No. 10. Desember 2018. Manado: Fakultas Hukum Universitas Negeri Sam Ratulangi.
- Riki Yuniagara. "Penggunaan Sema Nomor 7 Tahun 2014 dalam Penolakan Peninjauan Kembali Kajian Putusan Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016". *Jurnal Yudisial*. Vol. 13. No. 2. Agustus 2020. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Riries Nazriyah. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Kasus Simulator SIM (Kapolri VS KPK)". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 19. No. 4. Oktober 2012. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Roni Effendi. "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. 16. No. 1. Januari-Juni 2017. Batusangkar: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Ryan Kurniawan. "Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima". *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 28. No. 1. Februari 2013. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.
- Ryvaldo Vially Korua, Harold Anis, dan Youla O. Aguw. "Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana". *Lex Crimen*. Vol. 9. No. 4. Oktober-Desember 2020. Manado: Fakultas Hukum Universitas Negeri Sam Ratulangi.
- Saharuddin Daming. "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional". *Yustisi: Jurnal Hukum dan Islam*. Vol. 3. No. 1. Maret 2016. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor.
- Sari Aziz. "Kedudukan Prinsip Komplementaritas Mahkamah Pidana Internasional Atas Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 34. No. 3. Juli-September 2004. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Seno Wibowo Gumbira. "Problematika Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca

SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana)". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46. No. 1. Januari-Maret 2016. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sudiman Sidabukke. "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor". *Jurnal Yustika*. Vol. 10. No. 1. Juli 2007. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt". *Jurnal Yudisial*. Vol. 8. No. 3. Desember 2015. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Tommy Hendra Purwaka. "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional". *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 40. No. 1. 2011. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Yusuf Hendrawanto dan Mimi Mulyani. "Kelayakan Kebahasaan dan Isi Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas XII Semester 1 SMA". *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*". Vol. 2. No. 2. September 2017. Singkawang: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang.

#### D. Artikel Ilmiah

Shanti Dwi Kartika. "Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?". Artikel Ilmiah, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XI. No. 14, Juli 2019. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. tersedia di website [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XI-14-II-P3DI-Juli-2019-210.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-14-II-P3DI-Juli-2019-210.pdf).

Monika Suhayati. "Amnesti Bagi Kelompok Pemberontak Din Minimi". Artikel Ilmiah. *Info Singkat Hukum Kajian Siangkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. 8. No. 1. Romawi I. P3DI. Januari 2016. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. tersedia di website [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-1-I-P3DI-Januari-2016-72.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-1-I-P3DI-Januari-2016-72.pdf).

Candra Perbawati. "Tanggung Jawab Presiden dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia". *Paper Penegakan Hukum*. November 2019. Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Lampung. tersedia di website <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/14881>.

#### E. Buletin

Adhigama Andre Budiman, dkk. Buletin, Oktober 2020. Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi. tersedia di website <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/10/Final-Laporan-Pidana-Mati-2020-ICJR.pdf>, diakses pada 23 April 2021.

Tim Imparsial. Buletin. 2019. *Evaluasi Praktik Hukuman Mati Era Pemerintahan Jokowi (2014-2019)*. Jakarta: Imparsial *The Indonesian Human Rights Monitor*. tersedia di website [https://imparsial.org/wp-content/uploads/2020/09/Evaluasi-Praktik-Hukuman-Mati-Pada-Era-Pemerintahan-Jokowi-2014-2019\\_IMPARSIAL.pdf](https://imparsial.org/wp-content/uploads/2020/09/Evaluasi-Praktik-Hukuman-Mati-Pada-Era-Pemerintahan-Jokowi-2014-2019_IMPARSIAL.pdf). diakses pada 1 Oktober 2021

#### F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., tersedia di website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7dce3c848cb3b2ff6a8dd6bd2d0ea5b2.html>.

#### G. Surat Kabar Elektronik

Abba Gabrillin dan Hindra Liauw, Kompas.com, 1 Maret 2015, “Jokowi Dianggap Sepelekan Permohonan Grasi Terpidana Mati”, tersedia di website <https://nasional.kompas.com/read/2015/03/01/16495751/Jokowi.Dianggap.Sepelekan.Permohonan.Grasi.Terpidana.Mati>, diakses pada 22 Mei 2021.

Mohammad Yudha Prasetya. Merdeka.com, 9 Februari 2015. Soal Penolakan Grasi Hukuman Mati, Todung Tuduh Jokowi Abai. tersedia di website <https://www.merdeka.com/peristiwa/soal-penolakan-grasi-hukuman-mati-todung-tuduh-jokowi-abai.html#>. diakses pada 23 April 2021.

#### H. Lain-lain

Keterangan Narasumber Taufik Basari, dalam kegiatan virtual yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dan Imparsial *The Human*

*Rights Monitor*, “Diskusi Publik: Hukuman Mati di Masa Pandemi”, 16 Agustus 2021.

Pernyataan Edward Eddy Oemar Sjarief Hiariej. *Amnesty International Indonesia*. 21 April 2021. Diskusi Publik: Mengapa Tidak Boleh Ada Hukuman Mati. tersedia di website <https://youtu.be/SalmjvpKCfY>. diakses pada 23 April 2021.

Pernyataan Edward Eddy Oemar Sjarif Hiariej, *BeritaSatu*, 21 Juni 2019, “Saksi Ahli TKN Jokowi-Ma’ruf Patahkan Argumen Tim Prabowo-Sandi”, tersedia di website <https://youtu.be/Jcd2Hon5heQ>, diakses pada 19 Oktober 2021.

Pernyataan Edward Eddy Oemar Sjarif Hiariej, *Kompas.com*, 25 Agustus 2016, “Ahli Taksologi Forensik Jadi Saksi – Sidang Kasus Kopi Bersianida”, tersedia di website <https://youtu.be/8fKPHcKdPOc>, diakses pada 19 Oktober 2021.

Pernyataan Enny Nurbaningsih yang dinarasikan oleh Bagus Wicaksono, dalam Mengenal Konstitusi Berita MK (Mahkamah Konstitusi RI), 4 November 2020, “Enny Nurbaningsih: Hukum Merupakan Produk Politik”, tersedia di website <https://youtu.be/matkMOqDUEY>, diakses pada 19 Oktober 2021.

Pernyataan Erasmus Abraham Todo Napitupulu, *ICJRid*, 8 Oktober 2020, “Webinar Peluncuran Laporan Hukuman Mati 2020: Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia”, tersedia di website <https://youtu.be/zm87WSLimnc>, diakses pada 19 Oktober 2021.

Pernyataan Haris Azhar, dalam *tvOneNews*, 2 Agustus 2016, “Indonesia Lawyers Club – Geger Testimoni Freddy Budiman (Part 1)”, tersedia di website <https://youtu.be/UghPs5zIrSE>, diakses pada 19 Oktober 2021.

Pernyataan Joko Widodo, dalam *CNN Indonesia*, 12 September 2016, “Live Report: Jokowi: Duterte Izinkan Indonesia Eksekusi Mati Mary Jane”, tersedia di website <https://youtu.be/TxeuxjVE7Ko>, diakses pada 19 Oktober 2021.

Pernyataan Teresa. *LBH Masyarakat*. 9 Oktober 2020. Diskusi Publik Hari Anti Hukuman Mati dan Hari Kesehatan Jiwa. tersedia di website <https://youtu.be/rMcFl-oQ9Ek>. diakses pada 23 April 2021.